**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

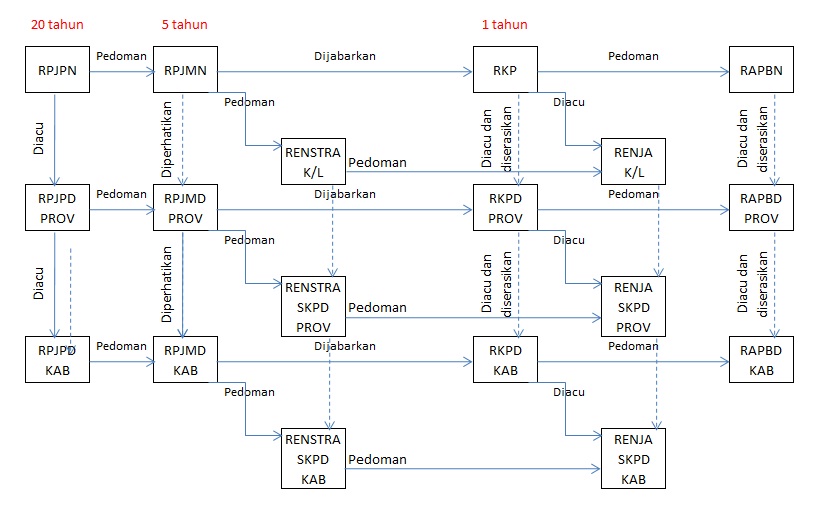
RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2021 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2021.

Renja Kecamatan Bansari Tahun 2021 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

**Renja Kecamatan Bansari Tahun 2021 disusun berdasarkan ...... dan juga** sebagai upaya pemulihan dari dampak *Corona Virus Disease 19* baik dari aspek ekonomi, kesehatan dan sosial masyarakat. Kegiatan-kegiatan prioritas yang tertunda pelaksanaannya di tahun 2020 karena *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan *Corona Virus Disease 19* dimasukan dalam Renja 2021 dengan formulasi program yang merupakan rangkuman guna pencapaian target**. Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Kecamatan Bansari Tahun 2021 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.**

****

Gambar 1.1

**Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan**

Renja Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Tahun 2021 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

1. **Pengolahan data dan informasi;**

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Kecamatan Bansari, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Kecamatan Bansari, yang menyangkut aspek:

1. Kondisi pelayanan Kecamatan Bansari;
2. Organisasi dan Tatalaksana Kecamatan Bansari;
3. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Bansari tahun sebelumnya;
4. Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra Kecamatan Bansari;
5. Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
6. Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Bansari;
7. Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Kecamatan Bansari;
8. Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
9. Rancangan awal RKPD Kabupaten Temangung tahun 2021;
10. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
11. Data Pokok Pembangunan Kecamatan Bansari; dan
12. Informasi lain terkait pelayanan Kecamatan Bansari.
13. **Analisis gambaran pelayanan Kecamatan Bansari;**

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Kecamatan Bansari adalah:

1. Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Bansari.
2. Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
3. Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Kecamatan Bansari untuk kondisi tahun 2019-2023**;**
4. Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2019, dan perkiraan realisasi tahun 2020 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2020;
5. Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Kecamatan Bansari.
6. **Me*review* hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Bansari tahun lalu berdasarkan Renstra Kecamatan Bansari;**

*Review* hasil evaluasi mencakup:

1. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
2. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
3. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Kecamatan Bansari. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

*Review* capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Kecamatan Bansari dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
2. Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Bansari tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Kecamatan Bansari;
3. Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra Kecamatan Bansari dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
4. Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Kecamatan Bansari sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.
5. **Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bansari;**

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bansari, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bansari berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Bansari tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Kecamatan Bansari.   
Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

* + - 1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Bansari dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Bansari;
      2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Bansari;
      3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG’s *(Sustainable Developmnet Goals)*;
      4. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
      5. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Bansari;
      6. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

1. **Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;**

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja programatau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Kecamatan Bansari.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

1. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
2. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
3. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.
4. **Perumusan tujuan dan sasaran;**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bansari yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Bansari.

1. **Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;**

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayananserta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bansari.  
Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Kecamatan Bansari. Namun dalam proses ini Kecamatan Bansari mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Bansari terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

1. **Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;**

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya*,* yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bansari dalam pembangunan daerah.

1. **Penyajian awal dokumen rancangan Renja Kecamatan Bansari;**

Penyusunan dokumen rancangan Renja Kecamatan Bansari merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

1. **Telaahan Kebijakan Nasional;**

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

1. **Penyempurnaan rancangan Renja Kecamatan Bansari;**

Penyempurnaan rancangan Renja Kecamatan Bansari perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

1. **Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan**

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Kecamatan Bansari dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

1. **Penyesuaian dokumen rancangan Renja Kecamatan Bansari dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.**

Dokumen rancangan Renja Kecamatan Bansari yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

* 1. **Landasan Hukum**

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Kecamatan Bansari Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
    1. **Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Renja Kecamatan Bansari Tahun 2021 adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Bansari untuk Tahun 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bansari.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Kecamatan Bansari Tahun 2021 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2021 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Bansari selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2021;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Bansari Tahun 2021;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan Bansari Tahun 2021; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bansari Tahun 2021.
   1. **Sistematika Penulisan**

Adapun sitematika penulisan dalam penyajian Renja Kecamatan Bansari Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BANSARI TAHUN 2019

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

**BAB II**

**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BANSARI TAHUN 2019**

* 1. **Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bansari Tahun 2019 dan Capaian Renstra Kecamatan Bansari Tahun 2019-2023**

Dalam melakukan penyusunan Renja Kecamatan Bansari Tahun 2021, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Kecamatan Bansari Tahun 2019 terhadap capaian renstra Kecamatan Bansari Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2020.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Kecamatan Bansari sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2020 terhadap target di Tahun 2021.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Kecamatan Bansari Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2019 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Renstra Kecamatan Bansari 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Bansari

s.d Tahun 2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Bidang /  Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Satuan | Target Akhir Renstra (2019) | | Realisasi  s/d 2018 | | Target 2019 | | | Realisasi per Triwulan Th. 2019 | | | | | | | | Realisasi  2019 | | Capaian  2019 | | Realisasi s/d 2019 | | Capaian s/d 2019 | | Ket. |
| I | | II | | III | | IV | |
| K | Rp. | K | Rp. | K | Rp (RENJA) | Rp (DPA) | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25=(8+21) | 26 | 27 | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Program Peningkatan pengelolaan Tata Pemerintahan** | | |  | **67.510.000** |  | **-** |  | **78.000.000** | **67.510.000** |  | **4.460.000** |  | **4.491.000** |  | **9.867.500** |  | **41.912.500** |  | **60.731.000** |  | **89,96** |  | **60.731.000** |  | 89,96 |  |
|  |  | Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan | % | 100 |  | 0 |  | 100 |  |  | 0 |  | 97,83 |  | 97,83 |  | 97,83 |  | 97,83 |  | 97,83 |  | 97,83 |  | 97,83 |  |  |
| Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan | % | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 100 |  |  |
| Persentase realisasi penerimaan PBB |  | 100 |  | 0 |  | 100 |  |  | 0 |  | 8,62 |  | 100 |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
| a | Koordinasi Pengelolaan Tata Pemerintahan | Peningkatan Koordinasi dengan Pem.Desa,PATEN,pelayanan pendaftaran Penduduk dan penyelesaian sengketa tanah,PPID,stastistik sektoral, pelestarian koleksi naskah kuno | Bulan | 60 | 25.667.500 |  |  | 12 | 33.000.000 | 25.667.500 | 3 | 780.000 | 3 | 4.491.000 | 3 | 9.867.500 | 3 | 4.490.000 | 12 | 19.628.500 | 100 | **76,47** | 12 | 19.628.500 | 20 | 76,47 |  |
| b | Koordinasi Potensi Desa | Terlaksananya kordinasi potensi desa | Bulan | 60 | 38.162.500 |  |  | 12 | 40.000.000 | 38.162.500 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | 37.422.500 | 12 | 37.422.500 | 100 | **98,06** | 12 | 37.422.500 | 20 | 98,06 |  |
| c | Fasilitasi Pengisian anggota BPD dan pelantikan BPD antar waktu | Terlaksananya Fasilitasi Pengisian Anggota BPD dan Pelantikan BPD | Desa | 13 | 3.680.000 |  |  | 13 | 5.000.000 | 3.680.000 | 13 | 3.680.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3.680.000 | 100 | **100** | 13 | 3.680.000 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program N1** | | | **100** | **91,51** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Predikat** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** | |  |  | **55.258.000** |  |  |  | **74.000.000** | **55.258.000** |  | **13.368.000** |  | **8.665.500** |  | **6.501.500** |  | **14.568.000** |  | **43.103.000** |  | **78,00** |  | **43.103.000** |  | **78,00** |  |
|  |  | **Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa Tepat waktu** | **%** | 100 |  | 0 |  | 100 |  |  | 0 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
|  |  | **Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu** | **%** | 100 |  | 0 |  | 100 |  |  | 0 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
| a | Koordinasi Pemberdayaaan Masyarakat Desa/Kelurahan | meningkatkannya kuantitas /kualitas kelembagaan desa/ kel,tertib adimistrasi penyelenggaraan pemdes /kel,tersusunya RKP Desa ,terlaksanakanya Musrembangdes dan tk kecamatan ,fasilitas keuangan kepala Desa,Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan meliputi Pokmasy ,Fasilitasi kerja sama antar desa ,Pemberdayaan lembaga adat masy hukum adat pemberdayaan organisasi pemuda olahraga dan pendidikan | Bulan | 60 | 28.050.000 |  |  | 12 | 39.000.000 | 28.050.000 | 3 | 11.968.000 | 3 | 2.000.000 | 3 | 1.306.500 | 3 | 9.423.000 | 12 | 24.697.500 | 100 | **88,05** | 12 | 24.697.500 | 20,00 | 88,05 |  |
| b | Fasilitas dana Transfer dan Bantuan Keuangan kepada Desa | terlaksanakanya pembinaan dan tertib adimistrasi keuangan kepada desa | bulan | 60 | 15.240.000 |  |  | 12 | 20.000.000 | 15.240.000 | 3 | - | 3 | 2.915.500 | 3 | 4.635.000 | 3 | 1.187.000 | 12 | 8.737.500 | 100 | **57,33** | 12 | 8.737.500 | 20,00 | 57,33 |  |
| c | Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) | Meninkatkan kualitas SDM pengurus PKK Desa | Bulan | 60 | 11.968.000 |  |  | 12 | 15.000.000 | 11.968.000 | 3 | 1.400.000 | 3 | 3.750.000 | 3 | 560.000 | 3 | 3.958.000 | 12 | 9.668.000 | 100 | **80,78** | 12 | 9.668.000 | 20,00 | 80,78 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program N 2** | | | **100** | **75,39** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Predikat** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga** | | |  | **16.190.000** |  |  |  | **21.500.000** | **16.190.000** |  | **5.687.000** |  | **980.000** |  | **5.778.000** |  | **3.715.000** |  | **16.160.000** |  |  |  | **16.160.000** |  |  |  |
|  |  | **Persentase tempat ibadah kondisi baik** | % | 75 |  | 0 |  | 75 |  |  |  |  | 83 |  | 83 |  | 83 |  | 83 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
|  |  | **Persentase RTLH** | % | 5 |  | 0 |  | 10,57 |  |  |  |  | 11,55 |  | 11,55 |  | 11,55 |  | 11,55 |  | 90,73 |  | **11,55** |  | 90,73 |  |  |
| a | Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Keluarga | Terlaksanakanya koordinasi peningkatkan kesejahteraan rakyat,pemberdayaan sosoial,perlindungan jaminan sosial,perlindungan perempuan | Bulan | 60 | 8.000.000 |  |  | 12 | 11.000.000 | 8.000.000 | 3 | 3.415.000 | 3 | 0 | 3 | 3.170.000 | 3 | 1.415.000 | 12 | 8.000.000 | 100 | 100 | 12 | 8.000.000 | 20,00 | 100 |  |
| b | Koordinasi Penanggulangan kemiskinan | Terlaksanakanya Penangulangan Kemiskinan | Bulan | 60 | 5.070.000 | 0 |  | 12 | 6.500.000 | 5.070.000 | 3 | 790.000 | 3 | 0 | 3 | 2.300.000 | 3 | 1.960.000 | 12 | 5.050.000 | 100 | 99,61 | 12 | 5.050.000 | 20,00 | 99,61 |  |
| c | Pendampingan Barang Bersupsidi | Terlaksakanya pendampingan Program Raskin | Bulan | 60 | 3.120.000 | 0 |  | 12 | 4.000.000 | 3.120.000 | 3 | 1.482.000 | 3 | 980.000 | 3 | 308.000 | 3 | 340.000 | 12 | 3.110.000 | 100 | 99,68 | 12 | 3.110.000 | 20,00 | 99,68 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program N 3** | | | **100** | **99,76** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Predikat** |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Program Peningkatan ketentraman dan Ketertiban Kasyarakat** |  |  |  | **22.967.400** |  |  |  | **11.500.000** | **22.967.400** |  | **3.300.000** |  | **12.967.400** |  | **3.400.000** |  | **3.300.000** |  | **22.967.400** |  |  |  | **22.967.400** |  | **100** |  |
|  |  | **Angka kriminalitas kecamatan Bansari** | % | 1 |  | 0 |  | 4,30 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 100 |  |  |
|  |  | **Persentase penanganan laporan kejadian** | % | 100 |  | 0 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100 |  |  |
| a | Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | Terlaksanakanya koordinasi Kesiapsiagaan Bencana Alam ,Keamanan dan ketertiban masyarakat dan berkurangnya tindak kriminal | bulan | 60 | 3.845.000 |  |  | 12 | 5.000.000 | 3.845.000 | 3 | 0 | 3 | 3.745.000 | 3 | 100.000 | 3 | 0 | 12 | **3.845.000** | 100 | 100 | 12 | 3.845.000 | 20,00 | 100 |  |
| b | Pemantauan Pilkada ,Pilpres dan Pemilu Legeslatif di tingkat Kecamatan | Terlaksanakanya Pemantauan kegiatan Pemilukada di tingkat Kecamatan | bulan | 60 | 5.922.400 |  |  | 12 | 6.500.000 | 5.922.400 | 3 | 0 | 3 | 5.922.400 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | **5.922.400** | 100 | 100 | 12 | 5.922.400 | 20,00 | 100 |  |
| c | Forum koordinasi Pemimpin keamatan (FORKOPINCA) | Terlaksananya Koordinasi pemimpin kecamatan. | bulan | 60 | 13.200.000 |  |  | 12 | 13.200.000 | 13.200.000 | 3 | 3.300.000 | 3 | 3.300.000 | 3 | 3.300.000 | 3 | 3.300.000 | 12 | 13.200.000 | 100 | 100 | 12 | 13.200.000 | 20,00 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program N 4** | | | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Predikat** |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Program Perencanaan , Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah** | **Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah** | % | 100 | **4.986.000** |  |  | 100 | **5.000.000** | **4.986.000** | 29 | **1.335.000** | 52,94 | **1.725.000** | 76,47 | **450.000** | 100 | **1.476.000** | 100 | **4.986.000** | 100 | 100 | 100,00 | 4.986.000 | 100 | **100** |  |
|  | Penyusun dan Pelaporan Dokumen Perencanaan | Tersusunnya Dokumen Renstra, Perubahan Renstra, Renja, Perubahan Renja, LKJip, LPPD, PK, Evaluasi Renja Triwulan (4) RFK (12), RKA,DPA,RKPA,, DPPA, IKPD (4), Data Pokok Pembangunan (4). | Dokumen | 167 | 4.986.000 |  |  | 34 | 5.000.000 | 4.986.000 | 10 | 1.335.000 | 8 | 1.725.000 | 8 | 450.000 | 8 | 1.476.000 | 34 | 4.986.000 | 100 | 100 | 34 | 4.986.000 | 20,36 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program N 5** | | | **100** | **100** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Predikat** |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **PENDUKUNG OPERASIONAL SKPD** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Prosentase pemenuhan kebutuhab administrasi perkantoran** | % | **100** | **155.465.800** | **0** |  | **100** | **140.500.000** | **155.465.800** | **100** | **31.953.295** | **100** | **39.493.819** | **100** | **32.174.175** | **100** | **42.021.470** | 100 | **145.642.759** | 100 |  | 100 | **145.642.759** | 100 | **93,68** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **100** |  |  |
| a. | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik | Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik | bulan | 60 | 19.980.000 |  |  | 12 | 20.000.000 | 19.980.000 | 3 | 4.001.412 | 3 | 2.912.936 | 3 | 4.006.792 | 3 | 5.550.087 | 12 | 16.471.227 | 100 | 82,44 | 12 | 16.471.227 | 20,00 | 82,44 |  |
| b. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Tersedianya jasa, alat, dan bahan kebersihan | bulan | 60 | 4.886.000 |  |  | 12 | 20.060.000 | 4.886.000 | 3 | 675.000 | 3 | 950.000 | 3 | 750.000 | 3 | 0 | 12 | 2.375.000 | 100 | 48,61 | 12 | 2.375.000 | 20,00 | 48,61 |  |
| c. | Penyediaan alat tulis kantor | Tersedianya alat tulis kantor | bulan | 60 | 8.000.000 |  |  | 12 | 8.000.000 | 8.000.000 | 3 | 1.586.000 | 3 | 2.845.000 | 3 | 1.600.000 | 3 | 1.969.000 | 12 | 8.000.000 | 100 | 100 | 12 | 8.000.000 | 20,00 | 100 |  |
| d. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | bulan | 60 | 5.000.000 |  |  | 12 | 5.000.000 | 5.000.000 | 3 | 700.000 | 3 | 1.630.000 | 3 | 950.000 | 3 | 1.720.000 | 12 | 5.000.000 | 100 | 100 | 12 | 5.000.000 | 20,00 | 100 |  |
| e. | Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik | bulan | 60 | 6.000.000 |  |  | 12 | 6.000.000 | 6.000.000 | 3 | 641.000 | 3 | 945.000 | 3 | 1.935.000 | 3 | 2.479.000 | 12 | 6.000.000 | 100 | 100 | 12 | 6.000.000 | 20,00 | 100 |  |
| f. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | bulan | 60 | 1.500.000 |  |  | 12 | 1.500.000 | 1.500.000 | 3 | 185.000 | 3 | 370.000 | 3 | 370.000 | 3 | 575.000 | 12 | 1.500.000 | 100 | 100 | 12 | 1.500.000 | 20,00 | 100 |  |
| g. | Penyediaan makanan dan minuman | Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, rapat, hari besar nasional, dan hari besar keagamaan. | bulan | 60 | 20.000.000 |  |  | 12 | 20.000.000 | 20.000.000 | 3 | 4.925.500 | 3 | 6.066.000 | 3 | 5.795.000 | 3 | 3.203.500 | 12 | 19.990.000 | 100 | 99,95 | 12 | 19.990.000 | 20,00 | 99,95 |  |
| h. | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah | Tersedianya biaya perjalanan luar daerah | bulan | 60 | 30.000.000 |  |  | 12 | 30.000.000 | 30.000.000 | 3 | 2.100.000 | 3 | 9.001.000 | 3 | 4.980.000 | 3 | 13.260.000 | 12 | 29.341.000 | 100 | 97,80 | 12 | 29.341.000 | 20,00 | 97,80 |  |
| i. | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | Tersedianya biaya perjalanan ke dalam daerah | bulan | 60 | 25.000.000 |  |  | 12 | 25.000.000 | 25.000.000 | 3 | 9.190.000 | 3 | 5.930.000 | 3 | 4.080.000 | 3 | 5.090.000 | 12 | 24.290.000 | 100 | 97,16 | 12 | 24.290.000 | 20,00 | 97 |  |
| j. | Jasa pelayanan perkantoran | Tersedianya uang lembur PNS dan ATK | bulan | 60 | 35.099.800 |  |  | 12 | 4.940.000 | 35.099.800 | 3 | 7.949.383 | 3 | 8.843.883 | 3 | 7.707.383 | 3 | 8.174.883 | 12 | 32.675.532 | 100 | 93,09 | 12 | 32.675.532 | 20,00 | 93 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program N 6** | | | **100** | **91,91** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Predikat** |  |  |  |  |  |  |  |
| B. | **Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur** | **Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur** | % | **100** | **77.000.000** |  |  | **100** | **80.000.000** | **77.000.000** | **100** | **8.650.750** | **100** | **11.468.000** | **100** | **24.325.000** | **100** | **27.014.000** | **100** | **71.457.750** | 100 |  | 100 | **71.457.750** | 100 | **92,80** |  |
| a. | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Tersedianya perlengkapan gedung kantor | set/ unit | 5 | 20.000.000 |  |  | 5 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 0 | 1 | 4.000.000 | 3 | 8.300.000 | 1 | 7.700.000 | 5 | 20.000.000 | 100 | 100 | 5 | 20.000.000 | 100 | 100 |  |
| b. | Pengadaan peralatan gedung kantor | Tersedianya peralatan gedung kantor. | set/ unit | 10 | 10.000.000 |  |  | 3 | 10.000.000 | 10.000.000 | 1 | 2.500.000 | 0 | 0 | 1 | 5.500.000 | 1 | 2.000.000 | 3 | 10.000.000 | 100 | 100 | 3 | 10.000.000 | 30,00 | 100 |  |
| c. | Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor | Terpeliharanya gedung kantor | bulan | 60 | 15.000.000 |  |  | 12 | 15.000.000 | 15.000.000 | 3 | 786.000 | 3 | 2.018.000 | 3 | 4.392.000 | 3 | 7.604.000 | 12 | 14.800.000 | 100 | 98,67 | 12 | 14.800.000 | 20,00 | 100 |  |
| e. | Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional | Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional | bulan | 60 | 20.000.000 |  |  | 12 | 20.000.000 | 20.000.000 | 3 | 4.754.750 | 3 | 4.600.000 | 3 | 4.673.000 | 3 | 4.730.000 | 12 | 18.757.750 | 100 | 93,79 | 12 | 18.757.750 | 20,00 | 93,79 |  |
| d. | Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan Rumah Dinas Camat | Terpeliharanya Rumah Dinas Camat | bulan | 60 | 2.000.000 |  |  | 12 | 5.000.000 | 2.000.000 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2.000.000 | 12 | 2.000.000 | 100 | 100 | 12 | 2.000.000 | 20,00 | 100 |  |
| f. | Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor | Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor | bulan | 48 | 5.000.000 |  |  | 12 | 5.000.000 | 5.000.000 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 900.000 | 12 | 900.000 | 100 | 18,00 | 12 | 900.000 | 25,00 | 18,00 |  |
| g. | Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor | Terpeliharanya peralatan gedung kantor | bulan | 60 | 5.000.000 |  |  | 12 | 5.000.000 | 5.000.000 | 3 | 610.000 | 3 | 850.000 | 3 | 1.460.000 | 3 | 2.080.000 | 12 | 5.000.000 | 100 | 100 | 12 | 5.000.000 | 20,00 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program N 7** | | | **100** | **87,21** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Predikat** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **JUMLAH** |  | **399.377.200** |  | **0** |  | **410.500.000** | **399.377.200** |  | **68.754.045** |  | **79.790.719** |  | **82.496.175** |  | **134.006.970** |  | **365.047.909** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah** | | | **100** | **92,25** |  |  |  |  |  |

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2019 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Kecamatan Bansari Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Bansari di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Bansari berupa:

* + - 1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sebagai berikut :
  1. Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan.

Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Tata Pemerintahan 100 % dan Kegiatan Koordinasi Pengembangan Potensi Desa/Kelurahan masih 100% dan Kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Pengisian Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sudah 100 % untuk Tahun Anggaran 2019.

* 1. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kecamatan.

Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019 dan kegiatan Fasilitasi dana transfer dan Bantuan Keuangan kepada desa 100 % serta kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sudah 100 %.

* 1. Program peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan.

Kegiatan koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 100 % dan Kegiatan Koordinasi penanggulangan kemiskinan sudah100 % serta kegiatan Pendampingan program barang bersubsidi sudah 100 %.

* 1. Program peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan.

Kegiatan ketentraman dan ketertiban umum sudah 100 % dan Kegiatan Pemantauan Pilkada,Pilpres, dan Pemilu Legeslatif di Tingkat Kecamatan sudah 100 % , serta Kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopmca) sudah 100 %.

* 1. Program Perencanaan, Evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah.

Kegiatan Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan sudah 100 %.

* 1. Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor, Pengadaan peralatan gedung kantor, Pengadaan perlengkapan rumah dinas, Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor dan Pengadaan sarana prasarana pendukung gedung kantor pada mencapai 100 %.

* + - 1. Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada.
      2. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Tahun 2019, maka dapat dikatakan bahwa Kecamatan Bansari dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori ***Baik*** yaitu dengan nilai **98,98%,**.

Dari Tabel 2.1. dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2019 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

* 1. **Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bansari** 
     1. **Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)**

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Kecamatan Bansari dapat dilihat padaTabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.4

Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Kecamatan Bansari

Kabupaten Temanggung

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA DAERAH | SATUAN | Kondisi 2018 | TARGET KINERJA | | | | | REALISASI KINERJA | | | | | CAPAIAN S/D 2019 (%) | STATUS | | | FAKTOR PENDORONG | FAKTOR PENGHAMABAT |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | TT | AT | UK |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* |
|  |  | INDIKATOR TUJUAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan | - | 82 | 70 |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | INDIKATOR SASARAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan | % | - | 1 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100 | V |  |  |  |  |
|  |  | Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu | % |  | 85,71 | 85,71 | 85,71 | 85,71 | 85,71 | 92,30 |  |  |  |  | 100 | V |  |  |  |  |
|  |  |  | Jumlah desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu | | | | | | | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jumlah Desa | | | | | | | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) | % |  | 10,57 | 9,13 | 7,72 | 6,35 | 5,00 | 11,55 |  |  |  |  | 0 |  |  | V |  |  |
|  |  | Persentase penanganan laporan kejadian | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  | 100 | V |  |  |  |  |
|  |  | INDIKATOR PROGRAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan | Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan | % | 97.39 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97,83 |  |  |  |  | 97,83 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jumlah penduduk mempunyai KTP-el di Kecamatan Bansari (jiwa) | | | | | | | 17,716 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah di Kecamatan Bansari | | | | | | | 18,109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan | % | - | 1 | 0:07 | 0:05 | 0:03 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100 | V |  |  |  |  |
|  |  |  | Jumlah perangkat desa yang melanggar disiplin di Kecamatan Bansari (jiwa) | | | | | | | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jumlah perangkat desa di Kecamatan Bansari (jiwa) | | | | | | | 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Persentase realisasi penerimaan PBB | % | N.A | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | V |  |  |  |  |
|  |  |  | Jumlah realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Bansari | | | | | | | 244.843.165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jumlah ketetapan PBB di Kecamatan Bansari | | | | | | | 244.843.165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa | Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu | % | 86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | V |  |  |  |  |
|  |  |  | Jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu | | | | | | | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jumlah Desa | | | | | | | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu | % | 86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | V |  |  |  |  |
|  |  |  | Jumlah desa yangmenyelesaikan APB-Desa tepat waktu | | | | | | | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jumlah Desa | | | | | | | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan | Persentase tempat ibadah kondisi baik | % | 100 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 83,33 |  |  |  |  | 100 | V |  |  |  |  |
|  |  |  | Jumlah rumah ibadah kondisi baik | | | | | | | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jumlah rumah ibadah | | | | | | | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Persentase RTLH | % |  | 10,57 | 9,13 | 7,72 | 6,35 | 5,00 | 11,55 |  |  |  |  | 0 |  |  | V |  |  |
|  |  |  | Jumlah rumah tidak layak huni | | | | | | | 906 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jumlah rumah tinggal | | | | | | | 7,839 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban masyarakat | Angka kriminalitas kecamatan | % | N.A | 4,3 | 3,3 | 2,3 | 1,3 | 1 | 0 |  |  |  |  | 100 | V |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Jumlah Tindak Kriminal | | | | | | | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jumlah Penduduk | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Persentase penanganan laporan kejadian | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  | 100 | V |  |  |  |  |
|  |  |  | Jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti | | | | | | | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jumlah laporan kejadian | | | | | | | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMLAH INDIKATOR SASARAN | | | 4 |  |  |  |  |  |  |  | RATA-RATA CAPAIAN SASARAN | | | | 75,00 |  |  |  |  |  |
| JUMLAH INDIKATOR PROGRAM | | | 9 |  |  |  |  |  |  |  | RATA-RATA CAPAIAN PROGRAM | | | | 88,65 |  |  |  |  |  |
| JUMLAH SEMUA INDIKATOR | |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  | **RATA-RATA CAPAIAN PD** | | | | **81,82** |  |  |  |  |  |

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 9 terdiri dari:

1. Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan mencapai 97,83 %
2. Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan, mencapai 100%
3. Persentase realisasi penerimaan PBB, mencapai 100 %.
4. Persentase jumlah desa yag menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu, mencapai 100%
5. Pesrsentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu, mencapai 100%.
6. Angka Kriminalitas Kecamatan, mencapai 100%
7. Persentase penanganan laporan kejadian, mencapai 100%
8. Persentase tempat ibadah kondisi baik, mencapai 100%
9. Persentase RTLH, mencapai 90,74%

Rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Kecamatan Bansari Kabuapeten Temanggung Tahun 2019 adalah sebesar 98.73 %

1. Faktor pendorong indikator tersebut adalah .............
2. Faktor penghambat indikator tersebut adalah .............
3. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah .............
   * 1. **Data Pokok**

Data Pokok pada Kecamatan Bansari terdiri dari :

1. **Indeks Kepuasan Masyarakat**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik semakin meningkat dimana masyarakat menuntut adanya akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum, serta menjawab pengguna layanan. Karena mutu pelayanan publik oleh aparatur pemerintah Kabupaten Temanggung dirasa masih sangat kurang sehingga belum memenuhi harapan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Berikut kami sampaikan nilai Indek Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir.

**Tabel 1.1**

# Nilai IKM Kec. Bansari Temanggung Tahun 2013-2019

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tahun** | **Nilai** | **Predikat** |
| 1 | 2013 | n.a | n.a |
| 2 | 2014 | 76 |  |
| 3 | 2015 | 73 |  |
| 4 | 2016 | 75 |  |
| 5 | 2017 | 82 |  |
| 6 | 2018 | 82 |  |
| 7 | 2019 | 81 | Baik |

*Sumber : Bagian Ortala Setda Kab. Temanggung Tahun 2019*

Berdasarkan tabel di atas, nilai indeks kepuasan masyarakat Kabupaten Temanggung dari Tahun 2014 sampai dengan 2019 dengan kategori baik.

1. **Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan**

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Perangkat Desayang tidak mentaati kewajiban dan atau melanggar ketentuan disiplin Perangkat Desa baik yang dilakukan di dalam maupun diluar jam kerja. Pelanggaran disiplin dimaksud meliputi:

* tidak masuk tanpa ijin resmi (menggunakan surat) 3x atau lebih dalam 1 bulan dan/atau
* tidak masuk dengan ijin resmi selain karena alasan sakit sebanyak 5x atau lebih dalam1 bulan
* melakukan tindakan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Rumus persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa adalah jumlah Perangkat Desa yang melanggar disiplin dibagi jumlah perangkat desa dikali 100%. Persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa diKecamatan Bansari dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.1**

Persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa di Kecamatan Bansari

Tahun 2015 – 2019.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **Tahun** | | | | |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| 1 | Jumlah perangkat desa yang melanggar disiplin di Kecamatan Bansari (jiwa) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Jumlah perangkat desa di Kecamatan Bansari (jiwa) | 116 | 166 | 133 | 133 | 133 |
| 3 | Persentase (%) | 100 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 100 |

*Sumber :Kecamatan Bansari Tahun 2019*

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase pelanggaran disiplin perangkat desa di Kecamatan Bansari sampai Tri Wulan IV sebesar 0 % .

1. **Persentase Kepemilikan KTP-el di KecamatanBansari**

Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Rumus perhitungan persentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Bansari adalah jumlah penduduk yang mempunyai KTP-el di Kecamatan Bansari dibagi jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau telah menikah di Kecamatan Bansari. Persentase kepemilikan KTP- el dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.1**

Persentasekepemilikan KTP-el di KecamatanBansari

Tahun 2015 – 2019 sampai dengan Tri Wulan IV.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **Tahun** | | | | |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| 1 | Jumlahpenduduk mempunyai KTP-el di Kecamatan Bansari (jiwa) | 17.542 | 19.850 | 16.825 | 17.716 | 17.716 |
| 2 | Jumlahpenduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah di Kecamatan Bansari | 17.565 | 17.638 | 17.843 | 18.109 | 18.109 |
| 3 | Persentase (%) | 99,87 | 112,548 | 94,40 | 97,83 | 97.83 |

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2019*

**Tabel 3.2.**

Penduduk Wajib KTP-el yang belum memiliki KTP-el di Kecamatan Bansari Tahun 2019

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **DESA** | **Wajib KTP yang belum memiliki KTP-el** |
| 1 | BANSARI | 8 |
| 2 | MRANGGEN TENGAH | - |
| 3 | MRANGGEN KIDUL | 6 |
| 4 | BALESARI | 2 |
| 5 | TLOGOWERO | 1 |
| 6 | CAMPURANOM | - |
| 7 | TANUREJO | 1 |
| 8 | CANDISARI | 3 |
| 9 | MOJOSARI | 3 |
| 10 | GENTINGSARI | - |
| 11 | GUNUNGSARI | 3 |
| 12 | PURBOREJO | 3 |
| 13 | REJOSARI | 1 |
| JUMLAH | | 31 |

*Sumber :DinasKependudukandanCapilKabupatenTemanggungTahun 2018*

1. **Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan/ atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya.

Rumus persentase realisasi penerimaan PBB adalah jumlah realisasi penerimaan PBB dibagi jumlah ketetapan PBB dikali 100%.Realisasi penerimaan PBB adalah jumlah penerimaan PBB selama satu tahun. Sedangkan ketetapan PBB adalah jumlah penentuan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang di tiap wilayah.

**Tabel 4.1.**

PersentaseRealisasiPenerimaan PBB di Kecamatan Bansari

Tahun 2015 – 2019

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | Tahun | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Jumlah realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Bansari | 272.383.348 | 244.413.153 | 244.686.648 | 244.352.721 | 244.843.165 |
| 2 | Jumlah ketetapan PBB di Kecamatan Bansari | 272.383.348 | 244.413.153 | 244.686.648 | 244.352.721 | 244.843.165 |
| 3 | Persentase (%) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

*Sumber :Kecamatan Bansari Tahun 2019*

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Bansari sampai bulan September 2019 sudah 100 %. Data dukung realisasi penerimaan semua desa tahun 2019 seperti Tabel berikut: **Tabel 4.2.**

Realisai Penerimaan PBB di semua Desa

di Kecamatan Bansari tahun 2019

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | DESA | Ketetapan PBB | TANGGAL LUNAS |
| 1 | BANSARI | 42.744.009 | 04 September 2019 |
| 2 | MRANGGEN TENGAH | 23.902.063 | 23 September 2019 |
| 3 | MRANGGEN KIDUL | 23.767.906 | 23 September 2019 |
| 4 | BALESARI | 18.716.294 | 19 September 2019 |
| 5 | TLOGOWERO | 11.794.648 | 16 September 2019 |
| 6 | CAMPURANOM | 12.511.438 | 23 September 2019 |
| 7 | TANUREJO | 7.705.498 | 05 September 2019 |
| 8 | CANDISARI | 26.075.492 | 19 September 2019 |
| 9 | MOJOSARI | 22.492.299 | 11 September 2019 |
| 10 | GENTINGSARI | 8.307.525 | 21 Maret 2019 |
| 11 | GUNUNGSARI | 11.688.492 | 06 Pebruari 2019 |
| 12 | PURBOREJO | 26.923.334 | 23 September 2019 |
| 13 | REJOSARI | 8.214.167 | 19 September 2019 |
| JUMLAH | | 244.843.165 |  |

*Sumber :Kecamatan BansariTahun 2019*

1. **Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset**

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa “Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Yang dimaksud dengan tertib dalam pengelolaan aset adalah semua asset yang dimiliki desa tercatat dalam buku inventaris barang.

Rumusnya desa yang Tertib dalam Pengelolaan Asetadalah sebagai berikut jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan asset dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase desa yang yang tertib dalam pengelolaan asetdiKecamatan Bansari Tahun 2014 sampai 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

# Tabel 5.1.

Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset

Kecamatan Bansari Tahun 2015 – 2019 sampai Tri Wulan IV

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan asset | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
| 2 | Jumlah Desa | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 3 | Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan aset | 92% | 92% | 92% | 92% | 100% |

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa semua desa di Kecamatan Bansari telah mencatat semua asetnya dalam buku Inventaris Barang.

1. **Persentase Laporan LPPD Tepat Waktu**

# Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang dilaksanakan oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat meliputi Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan, Program Pembinaan Kemasyarakatan, Program Pemberdayaan Masyarakat, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  dan Keberhasilan yang di capai yang ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret.Rumus Persentase Desa yang Mengirimkan laporan Tepat Waktu adalah jumlah desa yang menyerahkan LPPD tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%

Jumlah Desa yang mengirimkan LPPD tepat waktu di Kecamatan Bansari Tahun 2014 sampai 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

# Tabel 6.1

Desa yang Mengirimkan LPPD Tepat Waktu

di Kecamatan Bansari Tahun 2015 – 2019

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Jumlah desa yang mengirim LPPD tepat waktu | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 |
| 2 | Jumlah desa | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 3 | Persentase | 77 % | 77 % | 92% | 92 % | 100 % |

*Sumber: Kecamatan Bansari , 2019*

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Laporan administrasi desa tepat waktu di Kecamatan Bansari sampai tri Wulan IV sudah 100 %.

1. **Persentase Desa yang menyelesaikan kegiatan Tepat Waktu**.

Definisi desa menyelesaikan kegiatan tepat waktu adalah penyelesaian suatu kegiatan berdasarkan kepatuhan terhadap peraturan/tunduk kepada pengawasan dan pengendalian. Persentase desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu diperoleh dari jumlah desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu dibagi dengan jumlah seluruh desa dikali 100%.

# Tabel 7.1.

Persentase Desa yang menyelesaikan Kegiatan Tepat Waktu

di Kecamatan Bansari Tahun 2015 – 2019.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | Uraian | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Jumlah desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 |
| 2 | Jumlah Desa | n.a | n.a | 13 | 13 | 13 |
| 3 | Persentase desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu (%) | 0 | 0 | 92 | 100 | 92 |

*Sumber : Kecamatan Bansari Tahun 2019.*

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa semua desa yang ada di Kecamatan Bansari sudah menyelesaiakan suatu kegiatan berdasarkan kepatuhan terhadap peraturan/tunduk kepada pengawasan dan pengendalian.

1. **Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu.**

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Yang dimaksud tepat waktu adalah RKP-desa ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan September.

Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu di Kecamatan Bansari dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

# Tabel 8.1

Persentase Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu

di Kecamatan Bansari Tahun 2015 – 2019.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 |
| 2 | Jumlah Desa | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 3 | Persentase | 77% | 77% | 77% | 85% | 100 % |

*Sumber:Kecamatan Bansari Tahun 2019*

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa semua desa yang ada di Kecamatan Bansari menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu yang ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan September.

1. **Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu**

# Anggaran pendapatan dan belanja desa (APB-Desa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APB-Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan yang harus dilaporkan oleh penerintah desa selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember.Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu di Kecamatan Bansari Sampai 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

# Tabel 9.1.

Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu

di Kecamatan BansariTahun 2015 – 2019.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Jumlah desa yangmenyelesaikan APB-Desa tepat waktu | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 |
| 2 | Jumlah Desa | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 3 | Persentase | 85% | 85% | 85% | 90% | 100% |

*Sumber: Kecamatan Bansari Tahun 2019*

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa semua desa yang ada di Kecamatan Bansari menyelesaikan APB-Dea tepat waktu yang ditetapkan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember.

1. **Persentase rumah tidak layak huni**

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) didefinisikan sebagai rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.Untuk memperoleh persentase rumah tidak layak huni maka digunakan rumus jumlah rumah tidak layak huni dibagi jumlah rumah dikali 100%.

Realisasi persentase rumah tidak layak huni tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 10.1.**

Persentase Rumah Tidak Layak Huni

Kecamatan Bansari Tahun 2014-2019.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | Tahun | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Jumlah rumah tidak layak huni | 1261 | 1221 | 1.089 | 906 | 906 |
|  | Jumlah yang ditangani | 231 | 344 | 546 | 670 | 670 |
| 2 | Jumlah rumah tinggal | 5.954 | 5.954 | 7.839 | 7.839 | 7.839 |
| 3 | Persentase | 21,18% | 20,50 | 13,89 | 11,55 | 11,55 |

*Sumber: Bappeda KabupatenTemanggung 2018*

Dilihat dar Tabel diatas bisa dilihat bahwa masih ada rumah yang belum memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

1. **Persentase rumah ibadah dalam kondisi baik**

Rumah ibadah adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing.

Batasan kondisi baik meliputi:

* Masih layak untuk digunakan
* 83% kondisi bangunan secara umum baik
* Ada toilet
* Tersedia air bersih

Rumus penghitungan dari persentase rumah ibadah kondisi baikadalah jumlah rumah ibadah kondisi baik dibagi jumlah rumah ibadah dikali 100%.

Realisasi persentase rumah ibadah kondisi baik di Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

# Tabel 11.1.

# Persentase rumah ibadah kondisi baik

# Kecamatan Bansari Tahun 2015-2019

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | Tahun | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|  | Jumlah rumah ibadah kondisi baik | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|  | - Islam | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  | - Kristen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | - Katholik | - | - | - | - | - |
|  | - Hindu | - | - | - | - | - |
|  | - Budha | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | - Konghuchu | - | - | - | - | - |
|  | Jumlah rumah ibadah | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
|  | % rumah ibadah kondisi baik | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |

*Sumber: Kecamatan Bansari Tahun 2019*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase rumah ibadah dalam kondisi baik selama 6 Tahun sebesar 83 %..

1. **Angka Kriminalitas Kecamatan**

Angka Kriminalitas adalah jumlah tindak kriminal yang terjadi dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk kali 10.000.

Yang termasuk dalam kategori tindak kriminal adalah kasus narkoba, pembunuhan, kejahatan seksual, penganiayaan, pencurian, penipuan, dan pemalsuan uang.Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat dimana semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Yang dihitung sebagai tindak kriminal adalah laporan tindak kriminal di Polsek dan/ atau di Kecamatan atau kejadian tindak kriminal yang tidak perlu laporan (delik umum).

Rumus penghitungan dari angka kriminalitas kecamatan adalah jumlah tindak kriminal dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.

Angka kriminalitas kecamatan di Kecamatan Bansari dari tahun 2014 s.d 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 12.1.**

# Angka Kriminalitas Kecamatan Bansari Tahun 2015–2019

| No | Jenis Kriminal | Tahun | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | Jumlah kasus Narkoba | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2. | Jumlah kasus Pembunuhan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3. | Jumlah Kejahatan Seksual | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4. | Jumlah kasus Penganiayaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Jumlah kasus Pencurian | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 6. | Jumlah kasus Penipuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Jumlah kasus Pemalsuan uang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Total Jumlah Tindak Kriminal | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 9. | Jumlah Penduduk | 22.810 | 22.810 | 23.294 | 23.433 | 24.277 |
| 10 | Angka Kriminalitas | 1.7 | 0.8 | 1.7 | 1.7 | 0 |

*Sumber: Polsek Bansari Tahun 2019*

1. **Persentase Penanganan Laporan Kejadian**

Laporan kejadian adalah laporan kejadian dari desa yang dilaporkan kepada kecamatan dan tercatat dalam buku kejadian. Persentase penanganan laporan kejadian dihitung dengan rumus jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah laporan kejadian dikali 100%.Persentase Penanganan Laporan Kejadian di Kecamatan Bansari Tahun 2014 sampai 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

# Tabel 13.1.

Persentase Penanganan Laporan Kejadian di Kecamatan Bansari

Tahun 2015 – 2019 .

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti | 3 | 4 | 8 | 3 | 0 |
| 2 | Jumlah laporan kejadian | 3 | 4 | 8 | 3 | 0 |
| 3 | Persentase | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

*Sumber: Kecamatan Bansari Tahun 2019*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tidak ada kejadian yang dilaporkan dari desa kepada kecamatan .

1. **Persentase desa/kelurahan tangguh bencana**

Desa tangguh bencana adalah desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan dan menghadapi potensi ancaman bencana,adapun tujuan pengembangan desa tangguh bencana adalah agar masyarakat desa yang tinggal di kawasan rawan bencana bisa terlindungi dari dampak merugikan bencana yang menimpa wilayahnya.

Untuk memperoleh prosentase desa tangguh bencana maka digunakan rumus jumlah Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana dibagi jumlah desa/ kelurahan rawan bencana dikali 100%.

Cakupan Desa Tangguh Bencana sampai dengan Tahun 2019 sebagaimana terdapat pada Tabel berikut:

**Tabel 14.1**

Cakupan Desa Tangguh Bencana, Tahun 2015 – 2019.

| No | Kriteria | Tahun | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Jumlah desa/kelurahan rawan bencana | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 3 | Persentase Cakupan Desa Tangguh Bencana | 0 | 0 | 0 | 7,6 | 7,6 |

*Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah desa di Kecamatan Bansari yang berjumlah 13 Desa baru Satu Desa yang ditetapkan sebagai Desa Tangguh Bencana yaitu Desa Mranggen Kidul Kecamatn Bansari.

* 1. **Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bansari**

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Bansari dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bansari sebagaimana berikut:

1. **Isu Strategis Kecamatan Bansari**

Secara singkat Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung memiliki mandat yang harus dipertanggung jawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya, yaitu :

1. Meningkatkan akses/ pemerataan pelayanan publik dan pelayanan di bidang lainnya;
2. Meningkatkan sumber daya yang ada;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karateristik bersifat penting,mendasar,mendesak, berjangka panjang,dan menentukan tujuanpenyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa datang.

Isu strategis disusun berdasarkan gambaran pelayanan perangkat daerah dan permasalahan Perangkat daerah dengan memperhatikan dokumen rencana pembangunan RPJMD Kabupaten Temanggung.

Isu strategis Kecamatan Bansari pada 2019 adalah sebagai berikut :

1. Masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat

Pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya good governance. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (service excellence), yaitu:

1) Kecepatan,

2) Ketepatan,

3) Keramahan, dan

4) Kenyamanan.

Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan loyalitas masyarakat kepada organisasi (institusi) yang bersangkutan. Dengan tujuan pada misi ini yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi dan informasi, dengan beberapa strategi yang akan dilakukan:

1. Peningkatan kapasitas,manajemen dan kinerja pemerintah daerah dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi;
2. Peningkatan kapasitas,manajemen dan kinerja emerintah desa serta partisipasi masyarakat;
3. Inovasi percepatan dan perbaikan pelayanan publik;
4. Peningkatan peranserta masyarakat dalam mewujudkan nilai wawasan kebangsaan, ketrentraman dan ketertiban umum;
5. Optimalisasi mitigasi bencana.
6. Peningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa karena kurang tersusunnya struktur organisasi yang tepat, kinerja kelembagaan yang yang kurang baik, dan belum terbangunnya hubungan kerja antar organisasi di lingkungan pemerintahan desa, antara organisasi pemerintah dan masyarakat, dan terciptanya pemerintahan yang bersih dan baik.

Adapun permasalahan utama Kecamatan Bansari yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang pemerintahan, secara singkat dapat di rinci sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan publik;
2. Belum optimalnya pengelolaan administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan, pengelolaan asset dan pengelolaan kearsipan;
3. Menurunnya pengamalan budi pekerti, tata krama, nilai budaya dan keteladanan;
4. Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi dan inofasi pertanian, pengembangan infrastruktur pertanian dan pengembangan pertanian yang berwawasan lingkungan
5. Belum optimalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
6. Belum optimalnya pemenuhan lingkungan hunian/ pemukiman yang bersih dan sehat
7. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan pemuda dan pengembangan olah raga
8. Belum optimalnya pemerataan pembangunan insfrastruktur daerah
   1. **Review terhadap rancangan awal RKPD**

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel …. berikut:

Tabel 2...

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2021

| **RANCANGAN AWAL RKPD 2021** | | | | | | | **HASIL ANALISIS KEBUTUHAN** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja Program/Kegiatan** | **Target Kinerja** | **Satuan** | **Padu Indikatif** | **No** | **Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja Program/Kegiatan** | **Target Kinerja** | **Satuan** | **Kebutuhan Dana** | **Keterangan** |
| **1** | **2** |  | **3** | **5** | **6** | **7** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BELANJA TIDAK LANGSUNG |  |  |  |  | 1.173.417.466,00 |  | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  |  |  |  |  |  |
|  | Belanja Pegawai |  |  |  |  | 1.173.417.466,00 |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH |  |  |  |  |  |  |
|  | Belanja Pegawai |  | terpenuhinya gaji dan tunjangan pegawai | 14 | bulan | 1.173.417.466,00 |  | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  |  |  |  | 7.000.000 |  |
|  | Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja |  |  |  |  | 0,00 |  | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah |  | Terlaksananya Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 7 | dokumen | 3.000.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah |  | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 26 | dokumen | 4.000.000 |  |
|  | BELANJA LANGSUNG |  |  |  |  | 434.525.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan |  | Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan | 100 | % | 58.326.000,00 |  | Administrasi Keuangan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan | 0.5 | % |  |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |  | Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |  |  | 1.988.595.788 |  |
|  |  |  | Persentase realisasi penerimaan PBB | 100 | % |  |  | Belanja Pegawai |  | lembur 10 juta / tahun |  |  | 1.988.595.788 |  |
|  | Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan |  | Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang tata pemerintahan, meliputi : pelayanan perekaman E-KTP; input dan cetak KK; pelayanan pindah datang penduduk; verifikasi PATEN; rekomendasi ijin penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); pemberian ijin reklame, usaha mikro kecil modal kurang dari Rp. 500 juta, ijin akses jalan masuk kabupaten (ijin bongkar taman/kantin), penutupan drainase dan ijin tebang pohon pinggir jalan); pemberian ijin mendirikan bangunan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap IMB rumah tempat tinggal kurang dari 250 m2; pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dengan tingkat kabupaten; pengelolaan dan layanan informasi publik tingkat kecamatan sebagai PPID pembantu; diseminasi informasi melalui media luar ruang (baliho, spanduk), sarasehan (tatap muka, dan pertunjukan kesenian rakyat; Penyusunan LPPD dan LKPPD; penyusunan peraturan desa dan produk hukum desa lainnya; evaluasi rancangan peraturan desa dan klarifikasi peraturan desa; pembinaan dan pengisian kades, perangkat desa, BPD, dan PAW BPD; pembinaan pengisian buku administrasi desa; pelatihan aparatur pemerintahan desa; penanganan sengketa tanah; pelestarian naskah kuno di wilayah kecamatan | 12 | Bulan | 28.326.000,00 |  | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN |  |  | 13 | bulan | 1.319.972.874 |  |
|  | Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan |  | Terlaksananya Koordinasi pengembangan potensi desa | 13 | desa | 30.000.000,00 |  | Belanja Tambahan Penghasilan ASN |  |  | 12 | bulan | 668.622.914 |  |
|  | Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan |  | Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu | 100 | % | 66.136.000,00 |  | penyusunan Akuntansi dan pelaporan Keuangan |  |  | 12 | bulan | 20.000.000 |  |
|  |  |  | Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu | 100 | % |  |  | sppd dalam daerah |  |  |  |  |  |  |
|  | Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan |  | Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi : pelaksanaan musrenbang tingkat desa/kel dan tingkat kec; penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa; perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan dana transfer dan bantuan keuangan kepada desa; pembinaan pengelolaan keuangan desa dan tertib administrasi keuangan desa; pemantauan kegiatan pembangunan yang berlokasi di kec; penyelenggaraan lomba desa/kelurahan tingkat kecamatan dan pendampingan desa binaan; pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan kelembagaan desa/kel, masyarakat, adat, dan hukum adat; pembinaan dan pengawasan lembaga ekonomi desa dan masyarakat; pembinaan dan pengawasan BUMDesa dan BUMDesa bersama; pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kerjasama antar desa dan musyawarah antar desa; pembinaan dan pengawasan penangkapan ikan di perairan umum; pemantauan harga dan stock barang/pangan di tingkat kecamatan; pengawasan pupuk dan pestisida dalam pelaksanaan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi; metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan); pengolahan data profil desa/kelurahan dan profil kecamatan, pelaksanaan program kota tanpa kumuh | 12 | bulan | 41.136.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga( PKK) |  | Terlaksananya kegiatan PKK di Kecamaan dengan baik dan lancar | 12 | Bulan | 13.000.000,00 |  | Administrasi Umum |  |  |  |  |  |  |
|  | Fasilitasi Kawasan Perdesaan |  | Terfalitasinya kegiatan Kawasan perdesaan di 13 Desa Wilayah Kecamatan | 12 | Bulan | 12.000.000,00 |  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |  | Tersedianya Jasa Surat Menyurat | 12 | bulan | 5.000.000 |  |
|  | Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan |  | Persentase Tempat Ibadah Kondisi Baik | 75 | % | 31.757.000,00 |  | Jasa Surat menyurat |  |  |  |  | 2.000.000 |  |
|  |  |  | Persentase Rumah Tidak Layak Huni | 7,72 | % |  |  | SPPD Dalam daerah |  |  |  |  | 3.000.000 |  |
|  | Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat |  | Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang kesejahteraan rakyat, meliputi : Lomba tingkat pelajar SD/MI; budaya sehat dan kebersihan lingkungan; pelaksanaan lomba sekolah sehat, lomba gerakan sayang ibu dan lomba lainnya tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi; pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha; pengawasan usaha mikro obat tradisional (UMOT) dan pengobat tradisional (Pengobatan Alternatif); pengawasan Post Market produk makanan minuman industri rumah tangga; pembinaan dan pengawasan peredaran garam tidak beryodium; pendataan rumah ibadah; perayaan hari besar keagamaan; pemberdayaan sosial dan perlindungan jaminan sosial; pembinaan dan pengawasan pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial; rekomendasi hasil pendataan PMKS dan PSKS, Verval PBJ, JKN, KKS, dan BDT; pembinaan dan pemberdayaan organisasi kepemudaan, olahraga, kepramukaan dan sosial kemasyarakatan; pembinaan dan pengawasan kekerasan terhadap perempuan dan anak; pelaksanaan program barang bersubsidi dengan lancar | 12 | Bulan | 23.757.000,00 |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |  | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 | bulan | 20.000.000 |  |
|  | Koordinasi Penangulangan kemiskinan |  | Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan | 12 | Bulan | 8.000.000,00 |  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor |  | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 12 | bulan | 5.000.000 |  |
|  | Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan |  | Angka kriminalitas kecamatan | 2,3 | % | 25.406.000,00 |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional |  | Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 12 | bulan | 5.000.000 |  |
|  |  |  | Persentase penanganan laporan kejadian | 100 | % |  |  | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |  | Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan | 12 | bulan | - |  |
|  | Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum |  | Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang ketentraman dan ketertiban umum meliputi : tindak lanjut laporan kejadian; pembinaan satlinmas desa/kelurahan; pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana; pemantauan kegiatan Pemilukada, Pilpres, dan Pileg; perayaan hari besar nasional | 12 | Bulan | 12.206.000,00 |  | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor |  | Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor | 12 | bulan | 64.400.000 |  |
|  | Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca) |  | Terlaksananya Forum Pimpinan Kecamatan | 12 | bulan | 13.200.000,00 |  | Jasa Kebersihan Kantor |  |  |  |  | 21.000.000 |  |
|  | Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah |  | Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah. | 100 | % | 7.000.000,00 |  | Honor penjaga malam |  |  |  |  | 43.400.000 |  |
|  | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan |  | Terlaksananya Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat Daerah | 29 | dokumen | 7.000.000,00 |  | Penyediaan Alat Tulis Kantor |  | Tersedianya Alat Tulis Kantor | 12 | bulan | 10.000.000 |  |
|  | Program pelayanan adminsitrasi perkantoran |  | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran | 100 | % | 175.900.000,00 |  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |  | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | 12 | bulan | 5.000.000 |  |
|  | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik |  | Terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 12 | Bulan | 20.000.000,00 |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 12 | bulan | 4.000.000 |  |
|  | Penyediaan alat tulis kantor |  | Terlaksananya penyediaan ATK | 12 | Bulan | 5.000.000,00 |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan |  | Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan | 12 | bulan | 1.500.000 |  |
|  | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan |  | Terlaksananya Penyediaan barang Cetakan dan penggandaan | 12 | Bulan | 5.000.000,00 |  | Penyediaan Makanan dan Minuman |  | Tersedianya Makanan dan Minuman | 12 | bulan | 21.000.000 |  |
|  | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor |  | Terlaksananya Penyediaam Komponen Instalasi Listrik /penerangan | 12 | Bulan | 4.000.000,00 |  | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah |  | Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 12 | bulan | 30.000.000 |  |
|  | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan |  | Terlaksanya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 12 | Bulan | 1.500.000,00 |  | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional |  | Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | 2 | unit | - |  |
|  | Penyediaan makanan dan minuman |  | Terlaksananya Penyediaan Makanan dan minuman | 12 | Bulan | 21.000.000,00 |  | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor |  | Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 4 | paket | 10.000.000 |  |
|  | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah |  | Terlaksananya Rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah | 12 | Bulan | 30.000.000,00 |  | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor |  | Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 3 | paket | 15.000.000 |  |
|  | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah |  | Terlaksananya Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | 12 | Bulan | 25.000.000,00 |  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan |  | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan |  |  | 5.000.000 |  |
|  | Penyediaan jasa pelayanan perkantoran |  | Terlaksananya jasa pelayanan perkantoran | 12 | Bulan | 21.000.000,00 |  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |  | TerlaksananyaPemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 12 | bulan | 5.000.000 |  |
|  | Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor |  | Terbayarnya honor penjaga malam untuk 2 orang | 12 | Bulan | 43.400.000,00 |  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |  | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 12 | bulan | 15.000.000 |  |
|  | Program peningkatan sarana prasarana aparatur |  | Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur | 100 | % | 70.000.000,00 |  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor |  | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor |  |  | 5.000.000 |  |
|  | Pengadaan perlengkapan gedung kantor |  | Terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor | 2 | Paket | 10.000.000,00 |  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor |  | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor |  |  | 5.000.000 |  |
|  | Pengadaan peralatan gedung kantor |  | Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor | 2 | Paket | 15.000.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor |  | Terlaksanannya Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor | 12 | Bulan | 5.000.000,00 |  | UNSUR KEWILAYAHAN |  |  |  |  | 245.900.000 |  |
|  | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional |  | Terlaksananya pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas dan Operasional | 12 | Bulan | 20.000.000,00 |  | KECAMATAN |  |  |  |  |  |  |
|  | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas |  | Terlaksananya pemeliharaan Rutin Rumah Dinas | 12 | Bulan | 10.000.000,00 |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |  |  |  |  |  |  |
|  | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor |  | Terlaksananya pemeliharaan Rutin perlengkapan Gedung Kantor | 12 | Bulan | 5.000.000,00 |  | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan |  |  |  |  |  |  |
|  | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor |  | Terlaksananya pemeliharaan Rutin | 12 | Bulan | 5.000.000,00 |  | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan |  |  |  |  | 13.326.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan |  |  |  |  | 30.000.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan |  |  |  |  | 13.000.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan |  |  |  |  | 13.200.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Honor Forkopimca |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SPPD dalam daerah |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |  |  |  |  | 12.206.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal |  |  |  |  | 31.757.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa |  | Terwujudnya gedung inspektorat |  |  | 15.000.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa |  |  |  |  | 41.136.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan |  |  |  |  | 12.000.000 |  |

Sumber : Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Tahun 2019

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dan menjadi rencana program

dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

**BAB III**

**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

* 1. **Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun SDG’s. Kebijakan nasional yang diampu oleh Kecamatan Bansari lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung.

* 1. **Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Bansari**

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2021, maka tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Bansari Tahun 2021 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Kecamatan Bansari;
3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Bansari dalam rangka akuntabilitas kinerja Kecamatan Bansari.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Kecamatan Bansari Tahun 2021 ini adalah dalam rangka:

* + - 1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2021 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
      2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kecamatan Bansari Kab. Temanggung pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1.

Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja

dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Kabupaten Temanggung Tahun 2021

|  |
| --- |
| **VISI KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023** |
| TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG YANG TENTREM,MAREM, GANDEM |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MISI | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR SASARAN | SATUAN TARGET | TARGET TAHUN 2020 | TARGET KONDISI AKHIR 2020 |
|
| Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas | Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan desa | Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa | Program peningkatan Pengelolaan Tata Pemerintahan di Kecamatan | Persentese pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan | % | 0,07 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kecamatan. | Persentase penanganan laporan kejadian | % | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan | Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) | % | 9.13 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan | Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu | % | 95 | 100 |

*Sumber : Renstra Kecamatan Bansari Kab. Temanggung Tahun 2019-2023.*

Kebijakan dan strategi Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung di Tahun 2021 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Bansari Tahun 2019-2023. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi Kecamatan Bansari Tahun 2019-2023.

* 1. **Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan Kecamatan Bansari Kabupaten Temangung di Tahun 2021 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan Kecamatan Bansari Tahun 2021 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2021. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2021 sehinga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2021.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Kecamatan Bansari Tahun 2021 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.

Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan

Kecamatan Bansari Kab. Temanggung Tahun 2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RANCANGAN RENJA Kecamatan Bansari TAHUN 2021** | | |  | **RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021** | | |  | **( + / - )** |
| **No** | **Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan** | **Pagu Indikatif** |  | **No** | **Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan** | **Pagu Indikatif** |  | **Pagu Indikatif** |
| A | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEGAWAIAN** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | **PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH** |  |  |  |  |  |  |  |
| a | **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | xxx |  |  |  |  |  |  |
|  | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | xxx |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **JUMLAH** |  |  |  |  |  |  |  |

*Sumber : RKPD Kab. Temangung Tahun 2019*

Dari Tabel 3.2. di atas dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan/penurunan pagu indikatif Tahun 2019 sebesar Rp.......... Jika dilihat lebih jauh untuk kenaikan/penurunan Belanja .......... dikarenakan ............

Tabel …

Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Bansari Kab. Temanggung

Tahun 2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KODE REKENING** | | | | | **Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan** | **Indikator Program/Kegiatan** | **Rencana Kerja Tahun 2021** | | | | **Alokasi** | **Kinerja Anggaran Tahun 2019** | | | **Prakiraan Maju** | **Sumber Dana** |
| **Lokasi** | **Target Kinerja** | **Satuan** | **Pagu Indikatif** | **Anggaran 2020** | **Alokasi** | **Realisasi** | **%** | **Rencana 2022** |
| **1** | | | | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **X** |  |  |  |  | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **X** | **XX** | **1** |  |  | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** |  | **-** |  |
| **X** | **XX** | **1** | **2.01** |  | **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** |  |  |  |  | **7.000.000** |  |  |  |  |  |  |
| X | XX | 1 | 2.01 | 1 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Terlaksananya Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | KEC.BANSARI | 7 | dokumen | 3.000.000 |  |  |  |  |  | DAU |
| X | XX | 1 | 2.01 | 3 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | KEC.BANSARI | 26 | dokumen | 4.000.000 |  |  |  |  |  | DAU |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **X** | **XX** | **1** | **2.02** |  | **Administrasi Keuangan** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X | XX | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | KEC.BANSARI |  |  | **1.988.595.788** |  |  |  |  |  | DAU |
|  |  |  |  |  | Belanja Pegawai | lembur 10 juta / tahun |  |  |  | 1.988.595.788 |  |  |  |  |  | DAU |
|  |  |  |  |  | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN |  |  | 13 | bulan | 1.319.972.874 |  |  |  |  |  | DAU |
|  |  |  |  |  | Belanja Tambahan Penghasilan ASN |  |  | 12 | bulan | 668.622.914 |  |  |  |  |  | DAU |
|  |  |  |  | 2 | penyusunan Akuntansi dan pelaporan Keuangan |  |  | 12 | bulan | 20.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | sppd dalam daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **X** | **XX** | **1** | **2.03** |  | **Administrasi Umum** |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** |  | **-** |  |
| X | XX | 1 | 2.03 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Jasa Surat Menyurat | KEC.BANSARI | 12 | bulan | **5.000.000** |  |  |  |  |  | DAU |
|  |  |  |  |  | Jasa Surat menyurat |  |  |  |  | 2.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SPPD Dalam daerah |  |  |  |  | 3.000.000 |  |  |  |  |  |  |
| X | XX | 1 | 2.03 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | KEC.BANSARI | 12 | bulan | 20.000.000 |  |  |  |  |  | DAU |
| X | XX | 1 | 2.03 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | KEC.BANSARI | 12 | bulan |  |  |  |  |  |  |  |
| X | XX | 1 | 2.03 | 6 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | KEC.BANSARI | 12 | bulan | 5.000.000 |  |  |  |  |  | DAU |
| X | XX | 1 | 2.03 | 7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan | KEC.BANSARI | 12 | bulan | - |  |  |  |  |  |  |
| X | XX | 1 | 2.03 | 8 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor | KEC.BANSARI | 12 | bulan | **64.400.000** |  |  |  |  |  | DAU |
|  |  |  |  |  | Jasa Kebersihan Kantor |  |  |  |  | 21.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Honor penjaga malam |  |  |  |  | 43.400.000 |  |  |  |  |  |  |
| X | XX | 1 | 2.03 | 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor | KEC.BANSARI | 12 | bulan | 10.000.000 |  |  |  |  |  | DAU |
| X | XX | 1 | 2.03 | 11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | KEC.BANSARI | 12 | bulan | 5.000.000 |  |  |  |  |  | DAU |
| X | XX | 1 | 2.03 | 12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | KEC.BANSARI | 12 | bulan | 4.000.000 |  |  |  |  |  | DAU |
| X | XX | 1 | 2.03 | 15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan | KEC.BANSARI | 12 | bulan | 1.500.000 |  |  |  |  |  | DAU |
| X | XX | 1 | 2.03 | 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Tersedianya Makanan dan Minuman | KEC.BANSARI | 12 | bulan | 21.000.000 |  |  |  |  |  | DAU |
| X | XX | 1 | 2.03 | 18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | KEC.BANSARI | 12 | bulan | 30.000.000 |  |  |  |  |  | DAU |
| X | XX | 1 | 2.03 | 20 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | KEC.BANSARI | 2 | unit | - |  |  |  |  |  | DAU |
| X | XX | 1 | 2.03 | 22 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | KEC.BANSARI | 4 | paket | 10.000.000 |  |  |  |  |  | DAU |
| X | XX | 1 | 2.03 | 24 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | KEC.BANSARI | 3 | paket | 15.000.000 |  |  |  |  |  | DAU |
| X | XX | 1 | 2.03 | 26 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan | KEC.BANSARI |  |  | 5.000.000 |  |  |  |  |  |  |
| X | XX | 1 | 2.03 | 28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | TerlaksananyaPemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | KEC.BANSARI | 12 | bulan | 5.000.000 |  |  |  |  |  | DAU |
| X | XX | 1 | 2.03 | 30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | KEC.BANSARI | 12 | bulan | 15.000.000 |  |  |  |  |  | DAU |
| X | XX | 1 | 2.03 | 32 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor |  |  |  | 5.000.000 |  |  |  |  |  |  |
| X | XX | 1 | 2.03 | 34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor |  |  |  | 5.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | UNSUR KEWILAYAHAN |  |  |  |  | **245.900.000** |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 |  |  |  | KECAMATAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 | 2 |  |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 | 2 | 2.02 |  | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 | 2 | 2.02 | 3 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan |  |  |  |  | 13.326.000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 | 2 | 2.04 |  | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 | 2 | 2.04 | 3 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan |  |  |  |  | 30.000.000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 | 3 |  |  | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 | 3 | 2.01 |  | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 | 3 | 2.01 | 3 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan |  |  |  |  | 13.000.000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 | 4 |  |  | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 | 4 | 2.01 |  | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 | 4 | 2.01 | 1 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan |  |  |  |  | 13.200.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Honor Forkopimca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SPPD dalam daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 | 4 | 2.02 |  | **Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 | 4 | 2.02 | 1 | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |  |  |  |  | 12.206.000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 | 5 |  |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 | 5 | 2.01 |  | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 | 5 | 2.01 | 7 | Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal |  |  |  |  | 31.757.000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 | 6 |  |  | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 | 6 | 2.01 |  | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 | 6 | 2.01 | 2 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Terwujudnya gedung inspektorat |  |  |  | 15.000.000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 | 6 | 2.01 | 3 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa |  |  |  |  | 41.136.000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 | 6 | 2.01 | 9 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 | 6 | 2.01 | 18 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan |  |  |  |  | 12.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **181.625.000** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **JUMLAH BELANJA LANGSUNG** | | |  | ***434.525.000*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.423.120.788 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BANSARI, | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mengetahui | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CAMAT BANSARI | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Drs. BAMBANG SETYA UTOMO,MM** | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NIP. 19620606 198503 1 020 | | | |  |

**BAB IV**

**PENUTUP**

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2021 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Kecamatan Bansari untuk untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Kecamatan Bansari Tahun 2021 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Kecamatan Bansari itu sendiri maupun pihak-pihat yang memiliki keterkaitan dengan Kecamatan Bansari dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Kecamatan Bansari Tahun 2021 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses pengangaran di APBD Tahun Anggaran 2021. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Kecamatan Bansari Tahun 2021 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2021 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2019 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 96,36 % dan realisasi Belanja Langsung sebesar 91,40 % sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 sampai dengan semester I terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.943,951,963 (47,57) % dan realisasi Belanja Langsung sebesar Rp.92,526,793 ( 32,63) %.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2021 Kecamatan Bansari mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Tidak langsung sebesar Rp. 1.988.595.788 ,- dan Belanja Langsung sebesar Rp 434.525.000,- yang terdiri dari 3 program antara lain program perencanaan pembangunan; program pengembangan data/informasi; program penelitian dan pengembangan; Program peningkatan sarana dan prasarana laboratorium dan program penunjang operasional seperti program pelayanan administrasi perkantoran; program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan program peningkatan disiplin aparatur.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Kecamatan Bansari Tahun 2021 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Kecamatan Bansari dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika menungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, Juni 2020

CAMAT BANSARI

**Drs. BAMBANG SETYA UTOMO,MM**

NIP. 19620606 198503 1 020